

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang mempunyai beribu-ribu pulau yang dipisahkan oleh selat dan juga laut, ini merupakan kondisi lingkungan geografis yang menjadi sumber dasar adanya keanekaragaman ras, suku, budaya, dan juga golongan di Indonesia. Setiap pulau mempunyai suku dan budaya yang berbeda-beda, dengan kepemilikan wilayahnya tersendiri. Dengan kemajemukan tersebut tidak dipungkiri bahwa penggunaan akan lahan/tanah kewilayahan sangat banyak sekali dibutuhkan. Tanah yang merupakan sebuah karunia dari Tuhan yang Maha Esa merupakan sumber kesejahteraan, kehidupan, dan kemakmuran bagi setiap individu, oleh karena itu satu-satunya kebutuhan manusia untuk tinggal. Tanah mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengsebuah bangsa Indonesia yang dimana penggunaannya sangat dibutuhkan.

Tanah/lahan bagi setiap kehidupan manusia, mengandung makna yang multidimensional. Pertama, secara ekonomi, tanah itu merupakan sarana untuk produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan pada pemiliknya. Kedua, secara politis, tanah/lahan juga juga dapat menentukan posisi atau kedudukan seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. Ketiga, sebagai kapital

budaya, dapat menentukan tinggi rendahnya status sosial si pemiliknya. Keempat, tanah bermakna sangat sakral, yang artinya pada akhir hayat setiap orang akan kembali kepada tanah.

Peranan lahan/tanah dalam sebuah kehidupan manusia merupakan induk dari segala pokok kebutuhan selain dari kebutuhan pangan maupun sandang. Tanah dapat dinilai sebagai harta permanen, karena itu sebagai harta yang dinilai sangat bernilai ekonomis berkelanjutan untuk masa yang akan datang. Bukan sekedar bernilai ekonomis tinggi akan tetapi juga memiliki nilai-nilai lainnya yang dapat bisa menopang kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Namun, kebutuhan itu penting akan tanah bukan menjadi seseorang dapat dengan mudah memiliki dan juga menguasai tanah atau lahan. Penyebab inilah yang membuat sering kali lahan atau tanah membuat setiap individu atau kelompok berkonflik.

Konflik di era saat ini telah menjadi bagian dalam kehidupan manusia, yang mendorong terjadinya dinamika sosial baik itu dari segi politik maupun budaya. Konflik pun bisa terjadi kapan saja, dimana saja, dan oleh siapa saja, baik bersifat vertikal maupun horizontal. Jenis konflik itu sendiri mempunyai banyak sekali jenisnya contohnya saja, konflik antar partai politik, konflik antar mahasiswa, konflik pendukung sepak bola, konflik perebutan lahan, ataupun konflik antar institusi negara. Akibat dari konflik seperti ini maka banyak sekali dampak yang akan di dapat oleh para masa kerusuhan seperti dampak secara sosial, prikis, maupun secara fisik. Dalam upaya penyelesaian

konflik ini maka diperlukan manajemen konflik untuk melihat persoalan dan penyelesaiannya.

Bangsa Indonesia yang merupakan sebuah negara agraris membuat konflik perebutan lahan menjadi tidak asing lagi, tidak jarang kita melihat saat sekarang ini pemberitaan di media sosial ataupun media cetak sangat dipenuhi dengan pemberitaan perebutan lahan. perebutan lahan yang terjadi di Indonesia itu sendiri sangat mempunyai banyak faktor penyebabnya dengan berbagai golongan yang terlibat. Baik itu secara perorangan dengan perorangan, perorangan dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok lain. Biasanya konflik itu sering timbul karena merasa tanah itu sudah menjadi hak mereka masing-masing. Selain itu juga tanah saat ini merupakan hal yang sangat berharga bagi setiap individu manusia karena tanah atau lahan sudah menjadi bagian dari manusia baik itu untuk tempat tinggalnya, tempat mencari uang, tempat untuk menunjukkan status sosialnya dimasyarakat dan masih banyak hal yang sangat bernilai lainnya.

Sengketa agraria ini bahkan sering kali membuat konflik yang berkepanjangan dan juga memunculkan adanya kontak fisik antara pelaku dan hingga pada akhirnya menyebabkan ketidakstabilan politik di Indonesia. Seperti contohnya yang terjadi di Garut akhir-akhir ini dimana adanya konflik antara Pemerintah Daerah Kabupaten Garut (PemDa Garut) dan juga warga setempat dalam hal perebutan lahan dalam pembangunan stasiun Kereta Api. Konflik yang timbul diakibatkan tuntutan warga yang ingin lahan

pemukimannya tidak di gusur dan di alih fungsikan pada pembangunan stasiun dan rel kereta api.

Sengketa lahan yang terjadi di Garut inipun bukan hal pertama kali yang terjadi di Indonesia. Terdapat beberapa kasus konflik perebutan lahan yang terjadi di Indonesia misalnya kasus konflik yang terjadi di Kulon Progo soal pembangunan proyek bandara di kecamatan tersebut, konflik di pesisir pantai marosi, Sumba Barat, NTT yang menimbulkan korban nyawa. Selanjutnya, konflik yang pernah terjadi di Rumpin pada tahun 2007 kasus yang terdapat kasus sengketa lahan antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) dan juga warga setempat Desa Alastlogo Pasuruan, Tanak Awu, di Cisompet. Dan pada akhir-akhir ini juga terdapat konflik yang terjadi antara warga masyarakat dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) juga yang terjadi di daerah desa Setrojenar Kabupaten Kebumen. Secara singkatnya munculnya konflik ini terjadi adalah setelah 29 tahun lamanya tanah itu menjadi tempat latihan tentara. Akan tetapi perseteruan atas lahan tersebut kembali muncul pada tahun 2007. Warga mencari keadilan dengan berbagai cara dan upaya, seperti melalui DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), Bupati Kebumen, dan sampai kepada Komnas Ham (Hak Asasi Manusia) sekalipun. Akan tetapi, konflik ini tetap saja berlanjut sampai tidak menemui titik terang yang jelas dan menggantung begitu saja.

Menurut data yang dikeluarkan oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) setidaknya pada tahun 2018 telah mencatat terjadi 410 konflik agraria.¹ Lahan yang diperebutkan antara Pemda Garut dan warga setempat ini terletak

di Pakuwon, Garut Kota, Garut. Stasiun yang berada pada ketinggian +717 meter. Stasiun ini dibangun bersamaan dengan pembangunan lintas Cibatugarut. Karena pusat kota Kabupaten Garut agak jauh dari stasiun utama di kabupaten ini, maka perlu dibuat lintas cabang. Sehingga, dibangunlah jalur kereta api dari Stasiun Cibatugarut menuju Stasiun Garut. Jalur ini dibuka bersamaan dengan jalur dari Cicalengka pada tanggal 14 Agustus 1889. Selama ini lahan stasiun ini pernah digunakan oleh Organisasi Masyarakat (Ormas) untuk dijadikan kantor sekretariat, seiring berjalannya waktu fungsinya pun berubah menjadi pasar dan tempat tinggal warga.

¹diakses dari <https://katadata.co.id/berita/2019/01/03/selama-2018-konflik-agraria-paling-banyak-di-sektor-perkebunan> "Konflik Agraria Paling Banyak Di Sektor Perkebunan", pada tanggal 19 Agustus 2019 pukul 10:30

Kebijakan pemerintah melalui PT.KAI (Kereta Api Indonesia) berakibat pada masyarakat secara langsung, sebanyak 1.077 bangunan permanen dan semi permanen jalur kereta api Cibatugarut dibongkar.² selain itu masyarakat sekitar garut pun terjangkit gatal-gatal yang diakibatkan aktivitas penggusuran yang dilakukan oleh pihak pemda, dalam upaya-nya untuk membangun stasiun dan jalur kereta api ini.

Masyarakat garut dalam menyikapi kebijakan ini sangat beragam, ada yang menerima dan mendukung dengan alasan akan berdampak pada perekonomian masyarakat garut. Akan tetapi tidak sedikit yang menolaknya. Penolakan itu berasal dari khususnya warga yang terkena dampak secara

langsung. Masyarakat garut saat ini mendesak kebijaksanaan dari pemerintah daerah kabupaten Garut untuk memperhatikan nasib mereka. kebijakan berbeda dengan kebijaksanaan karena kebijakan adalah perintah atasan, sedangkan kebijaksanaan merupakan perubahan peraturan yang sudah ditetapkan oleh atasan sesuai keadaan situasi dan kondisi³

²diakses dari <https://bandung.kompas.com/read/2018/12/13/16531041/fakta-di-balik-reaktivasi-jalur-ka-cibatu-garut-ancam-jalan-kampung-hingga?page=all>“Fakta Dibalik Reaktivasi Jalur Ka Cibatu Garut Ancam Jalan Kampung”, pada tanggal 20 Agustus 2019 pukul 08:00 wib.

³prof. DR .H. Inu Kencana Syafii, M.Si, Ilmu Pemerintahan. Mandar Maju, Bandung, 2013, hal.168

“Secara pribadi dan semua warga merasa kecewa. mengapa harus sekarang, bukan dari sebelum-sebelumnya sudah dijadikan. Sekarang keluarga sudah betah, yang susah beradaptasi lagi dengan warga lain, kecewa dari situ”. Ujar Gani salah satu warga yang terkena dampak penggusuran.

Selain itu, tuntutan masyarakat yang diajukan terhadap Pemda Garut dirasa tidak di respon dengan baik. Inilah yang menyebabkan terjadinya konflik antara Pemda Garut dan warga setempat, yang telah menempati lahan tersebut setelah sekian puluhan tahun. Secara hukum lahan yang diperebutkan ini adalah milik PT.KAI yang digunakan masyarakat untuk pemukiman, dengan membayar sewa terhadap PT.KAI.

Akan tetapi konflik ini bermula dari pembangunan yang dirasa terlalu cepat bagi warga yang bingung harus pindah kemana, yang rata-rata perekonomian warga ditempat tersebut masih rendah. Dan juga respon Pemda yang seakan-akan tidak peduli terhadap warganya yang terkena dampak pembangunan stasiun ini membuat emosi masyarakat setempat semakin menjadi-jadi kepada pemerintah.

Berdasarkan dengan uraian singkat diatas mengenai latar belakang konflik perebutan lahan antara Pemerintah Kabupaten Garut dan Warga setempat, maka dipandang perlu untuk dikaji lebih dalam lagi mengenai faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi konflik ini bisa terjadi. selain itu, penulis juga tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana upaya penyelesaian yang terjadi akibat adanya konflik ini serta dampak yang ditimbulkan dari permasalahan ini, maka dari itu penulis menulis penelitian ini sebagai syarat Skripsi dengan judul:

“KONFLIK PEMBANGUNAN STASIUN KERETA API GARUT ANTARA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT DAN MASYARAKAT”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah dan juga warga sama-sama mempunyai kepentingan dengan lahan tersebut. Pemerintah menginginkan lahan tersebut

dijadikan stasiun kereta api dengan tujuan membangkitkan ekonomi daerah. Sedangkan masyarakat yang sudah puluhan tahun menduduki lahan tersebut menginginkan lahan tersebut tetap menjadi pemukiman untuk mereka.

2. Cara pemerintah daerah dalam membuat kebijakan dirasa tidak didasarkan kepada kepentingan masyarakat.
3. Dampak dari pembangunan stasiun ini sangat luas dan dirasakan oleh hampir semua masyarakat desa Pakuwon.

1.3 Pembatasan Masalah

Supaya pembahasan dalam penelitian ini tidak terlalu luas, maka penelitian ini akan lebih memfokuskan kepada aspek tentang konflik perebutan lahan antara masyarakat dengan pemerintah daerah kabupaten garut (studi kasus di Desa Pakuwon, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut)

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai faktor utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antara Pemda Garut dan Warga setempat?
2. Bagaimana upaya untuk menyelesaikan konflik antara Pemda Garut dan Warga setempat?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai/dituju oleh peneliti daalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan mengenai apa saja faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antara Pemda Garut dan Warga setempat.
2. Menjelaskan bagaimana upaya untuk menyelesaikan konflik antara Pemda Garut dan Warga setempat.

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat yang positif bagi semua pihak dan perkembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan konflik perebutan lahan. adapun manfaat dari penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Universitas Siliwangi

Diharapkan dengan adanya hasil penelitian ini akan bertambahnya koleksi bacaan sehingga dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai konflik perebutan lahan.

- b. Bagi Mahasiswa

Diharapkan penelitian ini menjadi referensi dan tambahan informasi bagi rekan-rekan mahasiswa untuk menambah

wawasan, pengetahuan dan juga pemahaman tentang konflik perebutan lahan.

c. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman nyata bagi peneliti sehingga yang nantinya dapat memberikan kontribusinya dalam penyelesaian permasalahan yang ada di masyarakat.

d. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini sangat diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan tambahan terhadap masyarakat pada umumnya agar selalu peka terhadap masalah-masalah yang terjadi disekitarnya sehingga dapat diambil solusi yang terbaik dan juga memberikan kontribusi bagi menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitarnya.

2. Manfaat Teoritis

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya, menambah pengetahuan bacaan mengenai konflik perebutan lahan dan juga selanjutnya menjadi bahan acuan khususnya bagi penelitian yang sejenis dimasa berikutnya.

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan juga memberikan kontribusi yang nyata bagi pengembangan pendidikan dan juga dapat meningkatkan perkembangan ilmu

pengetahuan terutama ilmu politik, pada kehidupan sosial khususnya mengenai pengetahuan pengembangan studi ilmu politik.